

KOPERASI MERAH PUTIH DAN TANTANGAN DEMOKRASI EKONOMI

Esther Sri Astuti, Ph.D.

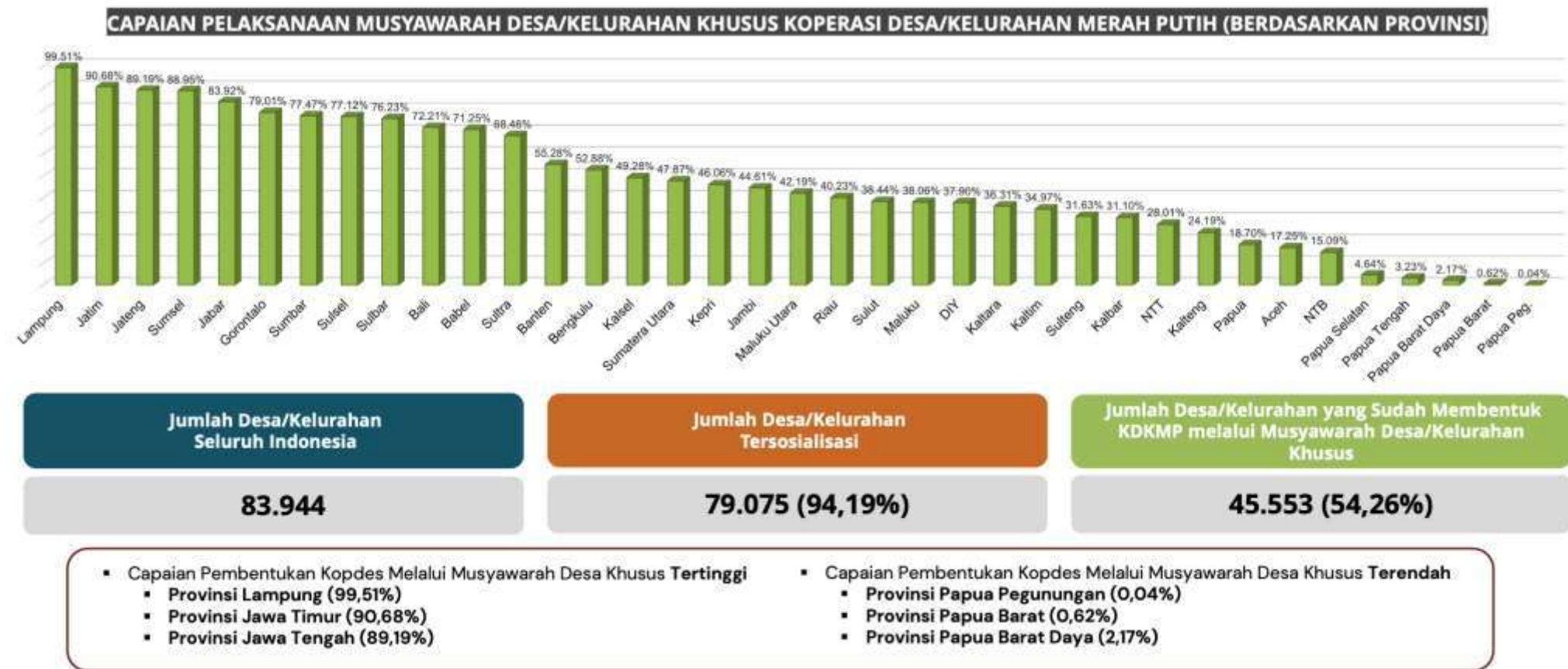
Direktur Eksekutif INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro

Juli 2026



JUMLAH KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI INDONESIA



Sumber: Kop.go.id, 2025.

Pada 2025, total koperasi Desa Merah Putih yang beroperasi sebanyak 83.944 tersebar dari sabang sampai Merauke (Kementerian Koperasi, 2025).

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH

Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan koperasi desa untuk meningkatkan ketahanan pangan

Sejumlah tantangan di pedesaan, seperti rantai distribusi yang panjang, keterbatasan modal, dan praktik makelar yang menekan harga jual petani .

Presiden Prabowo menargetkan pembentukan hingga 80.000 Koperasi Desa yang diberi nama “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP)

PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH

Pembentukan koperasi ini dinyatakan melalui tiga pendekatan, yakni membangun koperasi baru, melakukan pengembangan pada koperasi eksisting, dan revitalisasi koperasi yang berpotensi, tetapi sudah tidak aktif.

KDMP/KKMP akan menyediakan beberapa layanan/unit usaha, seperti simpan pinjam, klinik dan/atau apotek desa, *cold-storage*-unit logistik, gerai sembako, gudang dan pengering, agen pupuk, sarana logistik desa, hingga bahan bakar dan elpiji gas melon .

Secara konseptual, KDMP/KKMP akan menjadi penghubung antara produsen dan konsumen atau penyalur/penghimpun produk dari anggota maupun non-anggota untuk disalurkan ke masyarakat/pasar yang lebih luas

SKEMA PENDANAAN KOPERASI MERAH PUTIH



1. Total kebutuhan anggaran untuk program ini diperkirakan mencapai Rp 240 triliun hingga Rp 400 triliun.
2. Sumber pendanaan berasal dari :
 - a) Dana Transfer ke Daerah: Alokasi dana pemerintah daerah dan pusat, termasuk Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang dapat digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur fisik seperti gerai dan pergudangan.
 - b) Modal Sendiri: Berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari anggota koperasi.
 - c) Sumber Lainnya: Dana yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

Sumber: INDEF, 2025.

SKEMA PENDANAAN KOPERASI MERAH PUTIH



Kebijakan pengalihan sebagian Dana Desa untuk membiayai atau membayar cicilan koperasi menurunkan kapasitas fiskal desa. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa anggaran untuk pelayanan publik dasar (seperti Posyandu) dan pembangunan infrastruktur desa akan terpengkas

Sumber: INDEF, 2025.

URGENSI PENGAWASAN KOPERASI MERAH PUTIH



Pertama, perlu adanya mekanisme koordinasi formal seperti pembentukan tim gabungan yang menyusun panduan transisi koperasi dari *close loop* ke *open loop*, termasuk notifikasi wajib kepada OJK ketika koperasi mulai menjalankan fungsi simpan pinjam



Kedua, diperlukan kriteria regulasi yang jelas, seperti penetapan ambang batas aset atau jumlah anggota, untuk menentukan kapan pengawasan OJK diperlukan



Ketiga, pengembangan platform data terpadu penting untuk memantau kinerja, risiko, dan kepatuhan koperasi secara menyeluruh



Keempat, fasilitas pelatihan bersama bagi pengurus koperasi agar mereka memahami tata kelola, manajemen risiko, dan teknologi yang relevan, khususnya bagi koperasi produksi yang ingin berekspansi ke sektor keuangan.

Sumber: INDEF, 2025.

TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI MERAH PUTIH



Pembentukan KDMP/KKMP yang didasarkan pada mandat dari pemerintah pusat, arahan yang tersentralisasi, dan disertai dukungan pendanaan besar cenderung bersifat *top-down*, bukan *bottom-up*, sebagaimana idealnya. Persiapan yang terkesan terburu-buru dan tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa menyebabkan perencanaan kelembagaan menjadi kurang matang. koperasi idealnya dibangun melalui partisipasi kolektif masyarakat

- ❖ Konsep koperasi dalam demokrasi ekonomi justru berbeda dengan skema Koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk melalui instruksi politik dari atas. Bukan dari kebutuhan masyarakat di bawah.
- ❖ Keterlibatan negara yang terlalu besar dalam mengatur sistem ekonomi desa berpotensi melahirkan sentralisme baru. Kondisi tersebut dapat membuat negara terlalu dominan dalam menentukan arah ekonomi masyarakat desa. “Negara menentukan desainnya, menentukan strukturnya, bahkan menentukan arah bisnisnya.
- ❖ Skema Koperasi tersebut berpotensi memangkas ruang otonomi desa karena banyak program desa harus disesuaikan dengan agenda pembentukan koperasi

Sumber: INDEF, 2025.

TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH



Keberhasilan KDMP/KKMP sangat bergantung pada sistematis dan tata kelola kelembagaan yang jelas dan transparan. Pemerintah perlu menetapkan aturan main yang tegas, pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan, mekanisme koordinasi antar- lembaga yang terstruktur, serta sistem pengawasan partisipatif dari berbagai pihak terkait

Sumber: INDEF, 2025.

TANTANGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

- **Evaluasi Pelatihan:** Pelatihan militer bagi calon manajer koperasi sempat dievaluasi oleh pemerintah setelah adanya insiden jatuhnya korban jiwa selama masa pelatihan
- **Kinerja & Pasar:** Banyak koperasi sepi pembeli dan beromzet minim karena tidak mampu bersaing dengan ekspansi jaringan minimarket waralaba swasta yang lebih matang.
- **Tata Kelola:** Kebijakan ini dikritik keras karena dinilai bersifat top-down (dari atas ke bawah) dan dijalankan tanpa komunikasi publik maupun studi kelayakan bisnis yang memadai.
- **Risiko Korupsi:** perlunya kewaspadaan penuh agar konsep Kopdes Merah Putih ini tidak menjadi celah atau ladang korupsi baru bagi oknum pengelola, pengawas, hingga aparat desa yang memegang kekuasaan atas dana tersebut.
- **Urgensi Kelayakan Bisnis:** Pentingnya mitigasi risiko fiskal dan perlunya kajian mendalam agar koperasi berorientasi nyata pada kebutuhan riil dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target jumlah bangunan fisik semata.

TANTANGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

- KDMP ini diharapkan menjadi bentuk nyata dari prinsip *scaffolded institution*, lembaga yang tumbuh dari bawah, menopang dirinya sendiri, dan menyesuaikan dengan konteks sosial setempat.
- Struktur Permodalan dan Skala Ekonomi
 1. **Keterbatasan Leverage.** Berbeda dengan korporasi (PT) yang dapat dengan cepat menerbitkan saham atau surat
 2. **Utang;** koperasi memiliki keterbatasan instrumen untuk penggalangan dana
 3. **Risiko Likuiditas.** Pada koperasi simpan pinjam, ketidaksesuaian (mismatch) antara pendanaan jangka Masalah likuiditas
 4. **Satu anggota,** satu suara terkadang menimbulkan inefisiensi
 5. **SDM:** Pengurus seringkali bukan profesional
 6. **Pseudo-cooperatives** (koperasi semu) atau entitas berbadan hukum koperasi yang sebenarnya beroperasi layaknya shadow banking tanpa mitigasi risiko yang memadai.

DAMPAK KOPERASI DESA MERAH PUTIH

- Kontroversi sepiunya operasionalisasi KDKMP semakin memanas ketika dikaitkan dengan alokasi pembiayaan negara yang sangat fantastis, tetapi minim transparansi.
- Berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2026, pagu dana desa tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 60,57 triliun, dengan Rp 34,57 triliun atau 57 persennya dialokasikan secara terpusat untuk mendukung implementasi KDKMP.
- Pemotongan masif ini otomatis memangkas ruang fiskal mandiri desa untuk membiayai layanan dasar, infrastruktur irigasi, dan program pemberdayaan masyarakat yang jauh lebih mendesak.
- Risiko kerugian fiskal semakin nyata jika memperhitungkan skema pembangunan fisik gerai yang menggunakan fasilitas kredit dari bank pelat merah sebesar Rp 3 miliar per unit kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.
- Mekanisme pembayaran kembali pinjaman komersial tersebut berpotensi menahan dana desa hingga tahun 2032 dengan total proyeksi mencapai Rp 335 triliun secara nasional.

Catatan Penutup

- Pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai **tantangan**, seperti kualitas manusia pengurus koperasi yang bervariasi, lemahnya pengawasan, belum matangnya tata kelola kelembagaan, serta tumpang tindih fungsi dengan lembaga desa lainnya seperti BUMDes.
- Pendekatan **top-down yang minim partisipasi warga desa** juga berisiko menurunkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan koperasi. Potensi kepengurusan koperasi pada segelintir elit lokal atau tokoh masyarakat dapat memanfaatkan kelembagaan koperasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. KDMP ini diharapkan menjadi bentuk nyata dari prinsip scaffolded institution, lembaga yang tumbuh dari bawah, menopang dirinya sendiri, dan menyesuaikan dengan konteks sosial setempat
- Potensi moral hazard akibat persepsi bantuan sebagai “dana gratis” karena Dana Desa dijadikan sebagai agunan sehingga perbankan dapat lebih tenang menyalurkan pendanaan kepada koperasi merah putih. Artinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi terekspos terhadap risiko gagal bayar koperasi merah putih karena ketidakmampuan koperasi merah putih dalam mengembalikan pinjaman akan ditanggung oleh negara.
- **Risiko monopoli dalam distribusi komoditas pokok** juga perlu diwaspadai karena dapat mematikan semangat kewirausahaan dan persaingan usaha yang sehat di antara pelaku usaha di desa/kelurahan, khususnya mereka yang berskala mikro dan kecil. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan kolaborasi lintas lembaga, program ini berpotensi menjadi proyek jangka pendek yang tidak berdampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi desa.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Manusia Pengurus KDMP/KKMP. Pelatihan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang per wilayah sesuai kebutuhan kompetensi pengurus koperasi, diantaranya pelatihan manajerial dan operasional, personalia, keuangan, dan pemasaran, sehingga dapat mempercepat transfer pengetahuan kepada perwakilan pengurus. Pelatihan melibatkan Badan Sertifikasi Nasional Profesi (BNSP)

Perbedaan Pengelolaan Antara KDMP/KKMP dan BUMDes . BUMDes sebagai grosir pada level desa sehingga memudahkan masyarakat membeli kebutuhan dengan harga yang relatif terjangkau dan ketersediaan barang yang melimpah. KDMP/KKMP sebagai program baru dapat melibatkan angkatan kerja dengan kapasitas memadai namun belum bekerja secara penuh waktu atau bahkan belum bekerja sama sekali untuk dapat menjadi pengurus KDMP/KKMP

Monitoring dan Evaluasi Berkala via Digitalisasi. monitoring dan evaluasi (monev) yang memungkinkan adanya perbaikan secara terus- menerus pada tiap tahapan pelaksanaan koperasi merah putih. aspek digitalisasi menjadi penting agar pengurus koperasi merah putih dapat diawasi oleh pengawas koperasi merah putih, Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Daerah, dan Satgas KDMP/KKMP di tingkat pusat setiap saat.

Terima Kasih

Esther Sri Astuti S.A., Ph.D.
esa@indef.or.id

INDEF